



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171
Kota Ambon, Maluku 97128 Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 11 /KPTA.W24-A/KP4.1.3/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.**
N i p : 19590117 198903 1 001
Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Utama /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : **Drs. Abd. Razak Payapo**
N i p : 19631012 199303 1 005
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Utama Muda/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Pada tanggal 31 Desember 2024 masih menduduki Jabatan Hakim Utama Madya/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 170/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 dan pada tanggal 01 Januari 2025 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2024 Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Sdr. Drs. Abd. Razak Payapo berhak menerima tunjangan jabatan Hakim Utama Muda/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon

Ambon, 06 Januari 2025

Pejabat Yang Membuat Pernyataan,


Sahrudin/

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Kantor KPPN Ambon ;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
8. Pegawai yang bersangkutan.